

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan serius yang secara konsisten menghadang Indonesia sepanjang sejarah sebagai negara. Kemiskinan menjadi salah satu isu fundamental yang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan, yang diukur dengan garis kemiskinan, berpengaruh terhadap besar kecilnya persentase penduduk miskin. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan (Nasution, 2018).

Kemiskinan adalah situasi di mana seseorang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang esensial, seperti nutrisi, tempat tinggal dan pakaian, dengan standar yang memadai. Komisi Eropa (1981) mengadopsi definisi kemiskinan mengacu pada individu atau keluarga yang sumber dayanya sangat kecil sehingga mengecualikan mereka dari cara hidup minimum yang dapat diterima di wilayah tempat mereka tinggal. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli standar minimum barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup fisik, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan (Niemiets, 2011).

Kemiskinan terjadi diakibatkan keterbatasan kecukupan mutu pangan, dimana individu maupun kelompok tidak mampu membeli makanan pokok dalam rangka memenuhi persyaratan pangan yang layak dan bergizi. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar dan kurangnya pemahaman mengenai

gaya hidup sehat merupakan faktor penyebab rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Meskipun secara nasional ada peningkatan dalam kualitas kesehatan, kesenjangan dalam status kesehatan antara masyarakat, wilayah, perkotaan, dan pedesaan masih cukup tinggi. Akses dan kualitas pendidikan masih rendah, sehingga belum merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Disparitas pendidikan antara penduduk kaya dan miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan masih cukup besar. Terbatasnya peluang kerja dan berusaha juga menjadi masalah. Akses terhadap perumahan, sanitasi, dan air bersih terbatas. Selain itu, akses terhadap tanah dan sumber daya alam terbatas, dan kondisi lingkungan hidup semakin memburuk (Badrudin, 2017).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat diidentifikasi. Pertama, kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya yang menghasilkan kesenjangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat miskin memiliki sumber daya terbatas dan rendah kualitasnya. Kedua, kemiskinan juga terkait dengan perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan produktivitas kerja yang rendah, yang pada gilirannya berdampak pada upah yang rendah. Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan adanya diskriminasi dalam akses pendidikan dalam masyarakat. Ketiga, kemiskinan juga terkait dengan perbedaan akses terhadap modal. Tiga aspek penyebab kemiskinan ini berkontribusi pada teori lingkaran kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan (Sumardjoko, 2017).

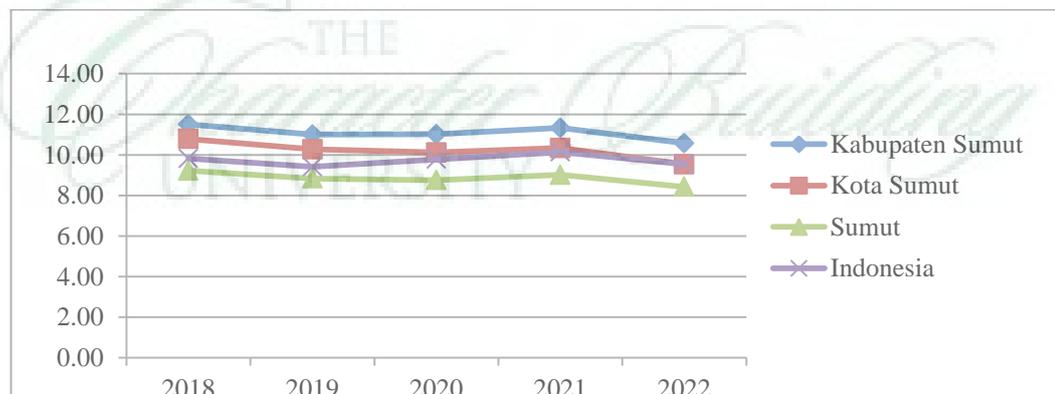
Secara umum kemiskinan telah melahirkan berbagai macam permasalahan. Kemiskinan melibatkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, serta aspek lainnya sehingga bersifat multidimensi. Kompleksitas ini juga merambah ke berbagai persoalan masyarakat seperti keterbelakangan pola pikir, kesenjangan sosial, serta kawasan kumuh yang mengakibatkan kemiskinan menjadi permasalahan sosial ekonomi yang sulit ditanggulangi.

Persoalan kemiskinan melanda seluruh wilayah Negara Indonesia, tidak terkecuali pada kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang cenderung berfluktuasi. Berikut tabel dan grafik data perkembangan persentase penduduk miskin kabupaten, kota, Sumut dan Indonesia dengan tahun amatan 2018-2022:

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin Wilayah Kabupaten, Kota, Sumut dan Indonesia Tahun 2018-2022

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin					Rata-Rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kabupaten Sumut	11.50	10.99	11.02	11.33	10.57	11.08
Kota Sumut	10.78	10.28	10.12	10.34	9.53	10.21
Sumut	9.22	8.83	8.75	9.01	8.42	8.85
Indonesia	9.82	9.41	9.78	10.14	9.54	9.74

Sumber: BPS SUMUT (data diolah 2023)



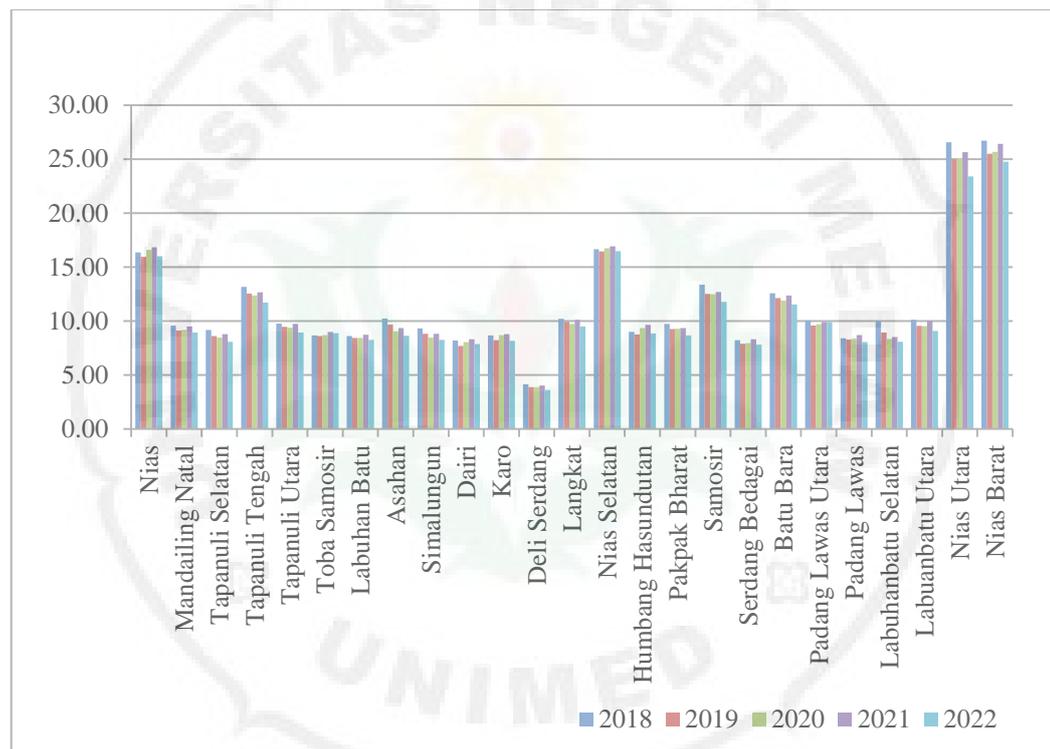
Sumber: BPS SUMUT (data diolah 2023)

Gambar 1. 1. Persentase Penduduk Miskin Wilayah Kabupaten, Kota, Sumut dan Indonesia Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik 1.1 diatas menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin dari tahun 2018 sampai 2022 untuk setiap wilayah kabupaten, kota, Sumut dan Indonesia. Dari grafik tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin untuk setiap wilayah amatan cenderung naik turun, mengalami penurunan di tahun 2019, meningkat tinggi pada tahun 2020 dan 2021, dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase penduduk miskin di wilayah kabupaten Sumatera Utara (Sumut) lebih tinggi daripada rata-rata persentase penduduk miskin di wilayah kota di Sumut maupun secara keseluruhan di Indonesia. Secara umum kenaikan yang terjadi tahun 2020 dan 2021 dipicu oleh pandemi *Covid-19* yang memang secara nasional melanda seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali pada kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Dalam masa ini terjadi krisis ekonomi global dimana meningkatnya resiko kemiskinan. Pandemi tersebut menyebabkan segala aktivitas ekonomi terhambat. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk tetap dirumah atau karantina menyebabkan kepanikan massal terhadap masyarakat terkait kekurangan bahan pangan untuk dikonsumsi sehingga terjadi peningkatan simpanan pangan yang selanjutnya menyebabkan kenaikan harga pangan itu sendiri. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sebagian besar tidak menemukan jalan keluar bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut termasuk diantaranya ketidakmampuan memperoleh sumber daya kesehatan dan sanitasi sehingga memicu bertambahnya orang masuk dalam lingkaran kemiskinan (Anser, et al., 2020). Hingga pada tahun 2022 pemerintah masih terus melakukan pemulihan dari sisi ekonomi untuk

mengatasi dampak yang di sebabkan oleh pandemi khususnya dampak terhadap kemiskinan.

Adapun sebaran persentase penduduk miskin untuk tiap kabupaten di Provinsi Sumut dalam rentang tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS SUMUT (data diolah 2023)

Gambar 1. 2. Persentase Penduduk Miskin Pada Tingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik 1.2 yang disajikan di atas, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2018-2022. Terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan 2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Selama periode tersebut, persentase penduduk miskin tertinggi di kabupaten-kabupaten Provinsi Sumatera Utara berada di wilayah Nias, khususnya kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias. Kabupaten Nias Barat memiliki persentase penduduk miskin

tertinggi dengan rata-rata 25,82%. Sementara itu, kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Deli Serdang dengan rata-rata 3,91%. Persentase kemiskinan yang tinggi di Nias Barat sangat mencolok jika dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin di Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Kabupaten di pulau Nias merupakan wilayah kepulauan yang terletak di luar Pulau Sumatera, sehingga daerah ini terisolasi dengan daerah lainnya. Keempat kabupaten Nias tersebut juga termasuk dalam daerah tertinggal yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, realisasi dana daerah, karakteristik daerah, serta aksesibilitas yang kurang memadai menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya perkembangan wilayah dan masyarakat di Nias, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya persentase penduduk miskin di wilayah tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penekanan kemiskinan adalah instrumen kebijakan fiskal melalui desentralisasi fiskal. Perubahan kemiskinan dijadikan sebagai indikator keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh sendi-sendi kemiskinan di daerah adalah melalui desentralisasi fiskal (Kementerian Keuangan, 2021). Desentralisasi fiskal adalah salah satu mekanisme pengalihan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan serta memberikan stimulus kepada aktivitas perekonomian masyarakat (Sun'an, 2015).

Dalam teori (Oates, 1999) menyatakan bahwa melalui desentralisasi fiskal, kesejahteraan ekonomi dapat dicapai ketika output barang dan jasa disediakan oleh tingkat pemerintahan terendah karena dianggap lebih mengetahui preferensi lokal, lebih dekat dengan penduduk, dan lebih memahami kondisi daerahnya daripada pemerintah pusat. Teori ini menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran (*revenue dan expenditure assignment*) antar tingkat pemerintahan.

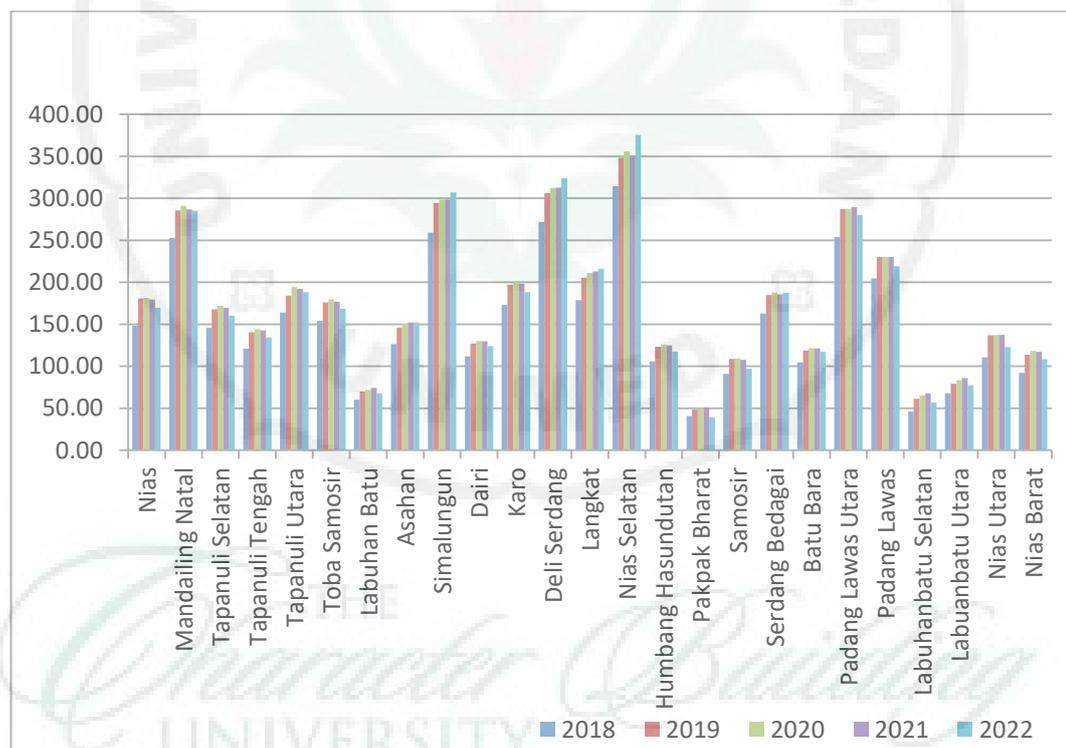
Beberapa instrumen desentralisasi fiskal yang menekan angka kemiskinan adalah Dana Desa, DAK Fisik dan Non Fisik. Hal ini sejalan dengan pendapat (Christia & Ispriyarso, 2019) menjelaskan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian penting dari belanja negara yang berperan dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Setiap daerah akan menerima transfer dana dari pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan, dan besaran anggaran yang diberikan kepada setiap daerah akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Instrumen desentralisasi fiskal melalui dana desa dapat menekan angka kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Handra, 2022) menyebutkan bahwa Dana desa yang dikelola secara langsung oleh pemerintah setempat memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Pengelolaan dana desa ini memungkinkan pemerintah desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menyediakan layanan publik sesuai dengan preferensi

masyarakat. Dengan demikian, pengalokasian dana desa menjadi lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa merupakan sejumlah dana yang berasal dari APBN dan diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini diperuntukkan secara prioritas untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 2017).

Berikut grafik data dana desa dalam Miliar di kabupaten Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2018-2022:



Sumber: DJPK (diolah, 2023)

Gambar 1. 3. Dana Desa Pada Tingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik 1.3 yang disajikan diatas, bisa diamati bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup meningkat setiap tahunnya untuk kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan rata-rata

perolehan transfer dana desa selama periode tahun 2018-2022, kabupaten yang memperoleh dana desa paling besar adalah Nias Selatan dengan rata-rata 349,14 Miliar rupiah, sedangkan kabupaten dengan perolehan transfer dana desa paling rendah adalah kabupaten Pakpak Bharat dengan rata-rata 45,97 Miliar rupiah. Penyaluran dana desa memperhatikan jumlah desa yang ada pada masing-masing kabupaten. Kabupaten Nias Selatan sebagai kabupaten yang memperoleh dana desa paling besar karena memiliki jumlah desa terbanyak berdasarkan data Badan Pusat Statistik yaitu 461 desa, sedangkan desa yang memperoleh dana desa paling rendah yaitu kabupaten Pakpak Bharat karena memiliki desa yang lebih sedikit pula yang hanya terdapat 52 desa.

Dana desa merupakan alokasi dana yang ditujukan untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan desa, dengan tujuan meningkatkan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Desa dianggap sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini, desa diberikan wewenang dan sumber daya yang cukup untuk mengelola potensi yang dimiliki, dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertindak untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perannya dalam pengelolaan dana desa (Kementerian Keuangan, 2017).

Kajian yang mengaitkan antara dana desa terhadap kemiskinan sudah banyak diteliti sebelumnya. Berdasarkan arah dan tujuan kebijakan, dana desa dapat berdampak negatif terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian

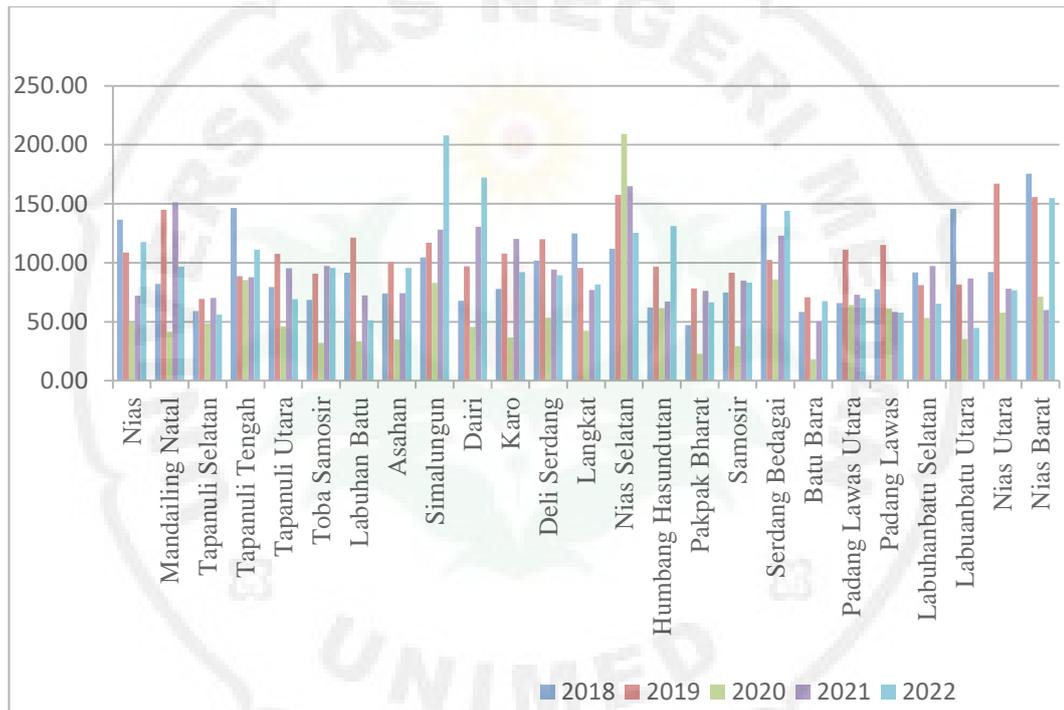
sebelumnya diantaranya (Arfiansyah, 2020), (Sigit & Kosasih, 2020) dan (Abdullah, 2022) yang menemukan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan hasil riset lainnya antara lain (Sunu & Utama, 2019) dan (Handayani, 2019) yang menemukan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena terdapat kesenjangan yang ditemukan dari hasil riset antar peneliti tersebut, sehingga kajian ini menjadi menarik diteliti untuk mengungkap lebih jauh pengaruh dana desa terhadap kemiskinan khususnya pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Instrumen lain yang mampu menekan angka kemiskinan adalah DAK Fisik. Hal ini diperkuat dari pendapat (Mujiwardhani, 2022) DAK Fisik yang berasal dari APBN dan dialokasikan dengan maksud untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan fisik di daerah yang menjadi prioritas nasional, serta mendukung penyelenggaraan layanan publik. Penggunaan dana ini telah ditentukan oleh pemerintah, termasuk salah satu arah kebijakannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.

DAK Fisik merupakan alokasi dana yang terdapat dalam APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan maksud untuk mendanai kegiatan fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK ini difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, baik untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun untuk mencapai prioritas nasional, guna mempercepat pembangunan

daerah dan kawasan yang memiliki karakteristik khusus serta mengatasi kesenjangan dalam pelayanan publik antardaerah (Mujiwardhani et al., 2022).

Berikut grafik data DAK Fisik dalam Miliar di kabupaten Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2018-2022:



Sumber: DJPK (diolah, 2023)

Gambar 1.4. DAK Fisik Pada Tingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik 1.4 diatas, bisa diamati bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan DAK Fisik yang berfluktuatif yang signifikan setiap tahunnya untuk kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Dapat dilihat transfer ke daerah DAK Fisik selama periode tahun 2018-2022, fluktuasi DAK Fisik ini disebabkan setiap tahun pemerintah melakukan perbaikan proses penganggaran dan pengalokasian sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kabupaten yang memperoleh DAK Fisik paling besar adalah Nias Selatan dengan rata-rata 153.73 Miliar rupiah, sedangkan kabupaten dengan perolehan DAK Fisik paling rendah

adalah kabupaten Batu Bara dengan rata-rata 53.01 Miliar rupiah. Pada tahun 2020, seluruh wilayah kabupaten mengalami penurunan anggaran DAK Fisik, hal ini dikarenakan alokasi diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan di masa pandemic *Covid-19*.

DAK Fisik diberikan prioritas dalam membantu daerah untuk mencapai standar pelayanan minimal kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik yang berfokus pada beberapa bidang infrastruktur, seperti irigasi, jalan, air minum, sanitasi, perumahan, dan permukiman. Selain itu, DAK Fisik juga digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. DAK Fisik juga difokuskan pada penguatan destinasi pariwisata dan sentra industri kecil dan menengah, serta pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui upaya tersebut, DAK Fisik diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat dan mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan, termasuk penurunan tingkat kemiskinan (Abdullah, 2022).

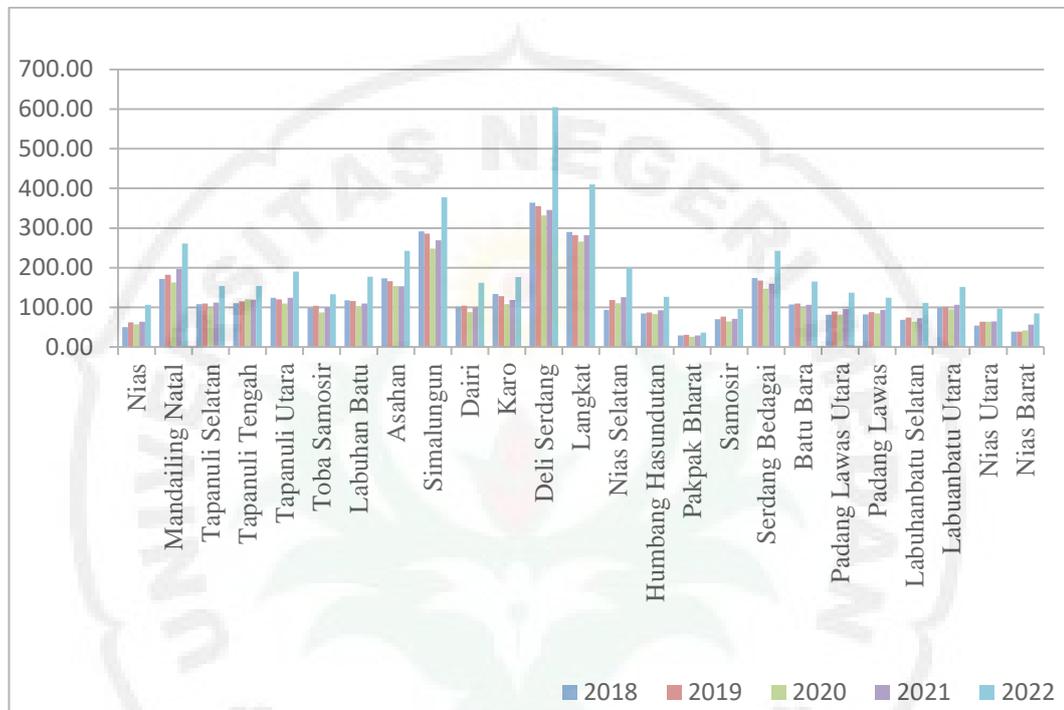
Kajian yang mengaitkan antara DAK Fisik terhadap kemiskinan sudah ada diteliti sebelumnya. Berdasarkan arah dan kebijakan DAK Fisik berdampak negatif kepada kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya diantaranya (Abdullah, 2022) yang menemukan bahwa DAK fisik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan hasil riset lain oleh (Ngatini, 2022) dan (Yusnida & Barika, 2020) yang menemukan bahwa DAK fisik berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap persentase kemiskinan. Oleh karena terdapat kesenjangan yang ditemukan dari hasil riset antar peneliti tersebut, sehingga kajian ini menjadi menarik diteliti untuk mengungkap lebih jauh pengaruh DAK Fisik terhadap kemiskinan khususnya pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Instrumen yang juga diduga mampu menekan angka kemiskinan adalah DAK Non Fisik. Hal ini diperkuat dari pendapat (Mujiwardhani, 2022) yang menyatakan bahwa DAK Non Fisik merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta mendukung operasionalisasi layanan publik. Penggunaan DAK Non Fisik telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. Dana ini digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan yang telah ditentukan, termasuk program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di daerah.

DAK Non Fisik merupakan alokasi dana dalam APBN yang diberikan kepada daerah dengan tujuan mendukung pendanaan kegiatan khusus yang bersifat non fisik dan merupakan urusan daerah. Dana ini bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional yang meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sejalan dengan prioritas nasional. Dalam konteks perluasan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan prioritas peningkatan kesejahteraan, DAK Non Fisik mendukung kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin (Mujiwardhani, 2022).

Berikut grafik data DAK Non Fisik dalam Miliar di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2018-2022:



Sumber: DJPK (diolah, 2023)

Gambar 1. 5. DAK Non Fisik Pada Tingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik 1.5 diatas, bisa diamati bahwa pemerintah pusat telah menganggarkan DAK Non Fisik yang berfluktuatif setiap tahunnya untuk kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Fluktuasi DAK Non Fisik ini disebabkan setiap tahunnya pemerintah melakukan perbaikan kebijakan pengalokasian, baik cakupan, besaran unit cost dan target sasaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dapat dilihat transfer ke daerah DAK Non Fisik selama periode tahun 2018-2022, kabupaten yang memperoleh DAK Non Fisik paling besar adalah Deli Serdang dengan rata-rata 400,20 Miliar rupiah dan sedangkan kabupaten dengan perolehan DAK Non Fisik paling rendah adalah kabupaten Pakpak Bharat dengan rata-rata 30,50 Miliar rupiah. Berdasarkan data anggaran DAK Non Fisik

menunjukkan bahwa daerah di kabupaten di pulau Nias justru menerima anggaran rendah padahal daerah kabupaten tersebut memiliki persentase kemiskinan paling tinggi sedangkan kabupaten Deli Serdang dengan kabupaten paling rendah persentase kemiskinan justru menerima anggaran yang paling tinggi.

DAK Non Fisik mencakup beberapa jenis pendanaan, seperti dana bantuan operasional sekolah, tunjangan Profesi Guru ASN daerah, bantuan operasional kesehatan dan KB, dana peningkatan kapasitas koperasi UKM, dana fasilitas penanaman modal, dana ketahanan pangan dan pertanian, serta dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah atau IKM. Dari berbagai kegiatan DAK Non Fisik tersebut, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas koperasi UKM, fasilitas permodalan, dan penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pertanian, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abdullah, 2022).

Kajian yang mengaitkan antara DAK Non Fisik terhadap kemiskinan sudah pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan arah dan kebijakan DAK Non Fisik berdampak negatif kepada kemiskinan. Ini sejalan dengan studi sebelumnya yang meliputi penelitian (Abdullah, 2022) yang menemukan bahwa DAK Non Fisik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Namun ternyata, hal ini juga sedikit bertentangan dengan hasil riset lain, (Ngatini, 2022) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan

DAK Non Fisik terhadap persentase penduduk miskin. Oleh karena terdapat kesenjangan yang ditemukan dari hasil riset antar peneliti tersebut, sehingga kajian ini menjadi menarik diteliti untuk mengungkap lebih jauh pengaruh DAK Non Fisik terhadap kemiskinan khususnya pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Sampai sekarang, kemiskinan tetap menjadi tantangan global yang berkelanjutan yang paling besar. Di Provinsi Sumatera Utara, kabupaten-kabupaten memiliki angka persentase kemiskinan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kota, Sumatera Utara secara keseluruhan, dan juga secara nasional di Indonesia. Selain itu tampak bahwa sangat mudah suatu wilayah mengalami dampak terhadap kemiskinan akibat dari wabah penyakit seperti pandemi *Covid-19* tahun 2020 dan 2021. Pemerintah pusat telah bersinergi penuh dengan mengalokasikan dana yang diharapkan dapat menyentuh langsung dasar kemiskinan bahkan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah. Namun dikhawatirkan dana yang dialokasikan dalam APBN tersebut belum mampu membawa dampak sesuai arah kebijakan yang ditujukan terhadap penekanan angka kemiskinan di kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan beberapa hasil riset empiris sebelumnya yang telah mengkaji bagaimana pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal melalui transfer ke daerah dan desa berupa dana desa, DAK Fisik dan Non Fisik terhadap kemiskinan masih terdapat kesenjangan (*research gap*). Sesuai arah kebijakan, TKDD ini salah satunya digunakan untuk menekan angka kemiskinan, yang selanjutnya akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Namun di beberapa daerah justru

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan dan justru menunjukkan pengaruh positif. Melihat harapan kebijakan TKDD ini yang seharusnya dapat menekan tingkat kemiskinan di daerah, maka perlu dikaji apakah TKDD yang dialokasikan di kabupaten di Provinsi Sumatera Utara khususnya mampu menekan angka kemiskinan.

Untuk mengetahui dan memahami dampak dari dana desa, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik terhadap persentase penduduk miskin pada kabupaten Provinsi Sumatera Utara secara individu dan keseluruhan maka alat analisis yang paling cocok digunakan adalah metode teknik analisis regresi data panel. Regresi data panel menggabungkan data time series dan cross section untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif dan beragam. Metode ini memiliki derajat kebebasan yang tinggi, efisiensi yang lebih baik, dan akurasi dalam mendeteksi serta menilai efek dengan cara yang sederhana (Baltagi, 2008).

Dengan pertimbangan kebijakan TKDD dengan permasalahan kemiskinan, ini tentunya menjadi perhatian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang bagaimana **“Pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Terhadap Persentase Kemiskinan pada Tingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara”**. Hal ini untuk menganalisis seberapa besar peran instrumen kebijakan fiskal tersebut dapat menekan persentase penduduk miskin pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rata-rata persentase penduduk miskin di wilayah kabupaten di Sumatera cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin daerah kota, Sumut dan secara global di Indonesia dalam rentang tahun 2018-2022.
2. Krisis ekonomi global, terhambat segala aktifitas ekonomi, kenaikan bahan pangan, terbatasnya pendapatan akibat pandemi *Covid-19* mengakibatkan terjadi fluktuasi kenaikan persentase kemiskinan pada kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten di pulau Nias sebagai daerah yang memiliki persentase kemiskinan paling tinggi memperoleh DAK Non Fisik yang rendah, sedangkan kabupaten Deli Serdang dengan persentase kemiskinan paling tinggi justru menerima DAK Non Fisik yang paling tinggi.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian adalah seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.
2. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh dana desa, DAK Fisik dan Non Fisik pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh dana desa terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah ada pengaruh DAK Fisik terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh DAK Non Fisik terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah ada pengaruh dana desa, DAK Fisik dan Non Fisik terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui DAK Fisik terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh DAK Non Fisik terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana desa, DAK Fisik dan Non Fisik terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diinginkan yaitu dapat memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan, pemikiran, dan informasi kepada pihak lain yang berkepentingan khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi. Serta

dijadikan acuan dan rujukan bagi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh dana desa, DAK Fisik dan Non Fisik terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti terkait pengaruh dana desa, DAK Fisik dan Non Fisik terhadap persentase kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Pemerintah

Bahan pertimbangan institusi yang berwenang yaitu pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan kebijakan pengalokasian APBN yang lebih tepat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, serta menjadi informasi dan gambaran kepada instansi terkait mengenai peran belanja pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.